

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 Lampung masih merupakan sebuah Karesidenan dari Provinsi Sumatera tahun 1 Kementrian Dalam Negeri dari 12 Kemerdekaan pemerintah, memutuskan bahwa seluruh wilayah Indonesia dibagi dalam delapan Provinsi dan setiap provinsi dibagi lagi menjadi beberapa Karesidenan, Kabupaten, Kotapraja, dan Kawedanan (Supangat, Dewan Harian Angk'45:10).

Selama periode perang kemerdekaan (1945-1949) banyak peraturan-peraturan pusat mengenai administrasi pemerintahan daerah yang tidak dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya. Perkembangan administrasi pemerintahan selanjutnya menjadi Provinsi Sumatera dengan sepuluh Karesidenan yaitu: Karesidenan Aceh, Karesidenan Sumatera Timur, Karesidenan Tapanuli, karesidenan Sumatera Barat, Karesidenan Riau, Karesidenan Jambi, Karesidenan Bengkulu, Karesidenan Lampung dan Karesidenan Bangka-Belitung (Nugroho Sutanto, 1975:244).

Memasuki zaman kemerdekaan dua hari setelah proklamasi PPKI menetapkan keputusan yaitu tentang pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi delapan Provinsi yaitu: Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. Setiap provinsi membawahi beberapa Karesidenan dan setiap Karesidenan dibagi lagi menjadi beberapa Kabupaten/Kotapraja (Supangat, Dewan Harian angk' 45,1994:105).

Daerah lampung kemudian segera dijadikan daerah Karesidenan yang dikepalai oleh seorang Residen Militer bernama Letnan Kol. Kurita (Dewan Harian Daerah, 1994:104). Dalam lembaga pemerintahan dibawah tingkat karesidenan, kepengurusannya diserahkan kepada orang Indonesia. Dalam

tindakan ini Jepang tidak mengawasi secara langsung melainkan hanya bertindak sebagai pengawas saja.

Semenjak proklamasi 17 Agustus 1945 maka terbukalah harapan bagi bangsa Indonesia umumnya, bahwa dalam alam kemerdekaan bisa dilaksanakan pembangunan yang membawa peningkatan taraf hidup disegala bidang. Setelah ada kabar dari Jakarta, khususnya PPKI memerintahkan kepada pemerintah kepemerintah daerah untuk mempersiapkan kemerdekaan yang seutuhnya. Pemerintah pusat menghimbau kepada daerah-daerah untuk melakukan perbuatan yang dapat memperkuat persatuan perjuangan dalam bidang pemerintahan dan kekuatan militer yang berguna untuk melawan serangan dari luar, seperti yang kita ketahui walaupun kita sudah merdeka gangguan masih saja datang yang dapat mengancam kemerdekaan indonesia.

Dalam usaha pemindah kekuasaan dari tangan Jepang kepemerintah Indonesia, diadakan perundingan antara (*suchokan*). Residen Jepang Khobayashi dengan Mr. Abbas (yang kemudian menjadi Residen pertama yang ditunjuk langsung dari pusat), dengan didampingi oleh St. Rahim Pasaman yang telah berjanji akan menyerahkan kekuasaan pemerintahan Karesidenan Lampung secara damai, pengembalian kekuasaan pemerintahan Karesidenan kemudian disusul dengan pengembalian instansi-instansi lain.

Instansi-instansi tersebut adalah :

1. Kantor tilpun tanjung karang
2. Kantor pos dan telegram
3. Stasiun kereta api
4. Perusahaan Gas dan Listrik

5. Pelabuhan Panjang dan Gudang Agen
6. Pabrik es
7. Gedung peralatan Kaygun
(Supangat, Dewan Harian Ang' 45 1994:136)

Sebagai residen pertama Karesidenan Lampung Mr. Abbas dan wakilnya St. Rasim Pasaman, mempunyai tugas-tugas penting diantaranya: Pengambilan kekuasaan pemerintah dari tangan Jepang ke tangan Pemerintah Republik Indonesia, pembentukan organisasi perjuangan dikalangan pemuda bekas *Heiho*, *Gyugun* serta organisasi politik, usaha untuk mendapatkan senjata dengan jalan melucuti senjata Jepang, pembentukan PKR (Penjaga Keamanan Rakyat) dibawah kepemimpinan Pangerah Emir Moh. Nur, yang anggotanya para mantan *Gyugun*, *Heiho*, *sjeneindan*, *Keibodan* dan tokoh-tokoh pemuda militan.

Di Lampung pada pertengahan bulan Desember 1945 para perwira *Gyugun* Lampung yang memimpin PKR, pelopor dan organisasi kelaskaran mengadakan musyawarah untuk membentuk Resimen III dengan komandan yang terpilih adalah Iwan Supardi, mendirikan sekolah latihan calon perwira di Langkapura. Pada bulan Februari 1946 tentara Jepang menduduki daerah Lampung telah selesai seluruhnya meninggalkan Lampung menuju Palembang, namun walaupun Republik Indonesia telah merdeka, akan tetapi sistem pemerintahan yang dipakai pada zaman Jepang masih tetap diteruskan.

Kekacauan pemerintahan yang pernah terjadi di Lampung berasal dari sebuah Resolusi yang dilakukan oleh sebuah badan yang menamakan dirinya Panitia Perbaikan Masyarakat (PBM). Berikut nama-nama presidium yang tergabung dalam organisasi Panitia Perbaikan Masyarakat, bertindak sebagai ketua umum Abdulillah Sani, Bagian

Keamanan Bek Ali, Bagian Penerangan Zuned Azhari, Bagian Perhubungan Ibrahim Itam, bagian Keuangan Kgs. Akhmadi, Bagian perancang Ibrahim Husin, bagian Penyidik Zaenal Abidin Keneron (Supangat, Dewan Harian Angk 45, 1994: 185-186).

Peristiwa tersebut terjadi pada bulan September 1946 yang bertujuan untuk mengambil kekuasaan pemerintahan Karesidenan Lampung dari Residen Mr. Abbas. Diawali pada tanggal 9 September 1946 mereka menempelkan pamflet-pamflet di Kota Tanjungkarang dan Teluk Betung mereka menuntut agar 15 orang pejabat yang duduk dalam pemerintahan Karesidenan Lampung pada waktu itu diberhentikan karena nilai tidak cukup, tidak adil dalam menjalankan pemerintahan. Daftar nama pejabat yang dituntut untuk mundur tersebut adalah :

1. Mr. Abbas, Residen Lampung
2. St. Rosman, Komisaris Polisi
3. W.A Rahman, Inspektur polisi dan pertahanan dan juga menjabat sebagai wakil ketua DPRD Karesidenan Lampung
4. R.A Basyid, Bupati Lampung Selatan
5. Mr. Gele Harun, Ketua pengadilan dan ketua konsentrasi nasional daerah lampung
6. Kuyung Harun, Inspektur Poloso rakyat
7. Dr. Samil, pemimpin pejabat kemamuan Karesidenan Lampung
8. A.Lumban Tobing, Sekertaris Karesidenan Lampung
9. Zahir, Kepala Kehutanan, merangkap kepala perdagangan dan perindustrian dari pejabat kemakmuran Karasidenan Lampung
10. MWL. Tobing, ketua jabatan Karasidenan Lampung bagian Badan Pengawas perusahaan
11. Sr. Pasaman, Inspektur keuangan.
12. Amir Hasan, Kepala Pejabat Penerangan
13. Azis Gustom, Inspektur Polisi I Teluk Betung
14. Su'ud, Inspektur Polisi I Tanjung Karang. (Nasution, 1977:565-566)

Usaha pendaulatan tersebut berhasil, kemudian Residen Lampung dijabat oleh Dr. Barel Munir, akan tetapi ia mengundurkan diri tanggal 29 November 1947 dan sebagai gantinya Rukadi yang menjabat sebagai Residen Lampung.

Pada tanggal 19 Desember 1948 Pukul 06.00 WIB agresi militer kedua di lancarkan Belanda, dengan pasukan lintas udara, serangan langsung di tujukan ke Ibukota Republik Indonesia, Yogyakarta. Lapangan terbang Maguwo dapat dikuasai Belanda, dan selanjutnya seluruh kota Yogyakarta. Angkatan perang yang telah membagi wilayah pertahanan Republik menjadi dua komando, yaitu Jawa dan Sumatera, siap melaksanakan rencana di bidang pemerintahan tersebut. Di Lampung Agresi militer kedua (Clash II) baru dimulai tanggal 1 Januari 1949, Belanda masuk ke Teluk Lampung melalui Kalianda menuju Pelabuhan Panjang. Kira-kira Pukul 05.00 pagi, kapal perang Belanda mulai menembaki Pelabuhan Panjang. Tetapi karena perlawanan dari pihak tentara kita di Panjang, baru setelah kira-kira jam 06.00 mereka dapat mendarat di Pantai luar Pelabuhan Panjang dan di Pantai sekitar Gunung Kunyit Telukbetung.

Ibukota Karesidenan akhirnya dapat diduduki oleh pasukan Belanda pada hari itu juga. Karena peristiwa itu, maka pemerintahan Karesidenan Lampung, Letnan Kolonel Syamaun Gaharu dengan anggota-anggota stafnya beserta pejabat-pejabat sipil Karesidenan Lampung pada tanggal 1 Januari 1949 sudah berada di Gedong Tataan, sedangkan rombongan keluarga militer dan sipil yang mengungsi sudah berada di Pringsewu. Dalam pada itu front utara dengan bataliyon mobilnya yang dipimpin oleh Mayor Nurdin pada tanggal 1 Januari 1949 sore hari sudah berada di Kotabumi (Ali Imron, dkk, 1994:28)

B. Analisis Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Upaya penyelamatan Karesidenan Lampung dalam bidang Ekonomi dari Agresi Militer Belanda II tahun 1949
2. Upaya penyelamatan Karesidenan Lampung dalam bidang Sosial dari Agresi Militer Belanda II tahun 1949
3. Upaya penyelamatan Karesidenan Lampung dalam bidang Politik dan Politik dari Agresi Militer Belanda II tahun 1949

2. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang “Upaya penyelamatan Karesidenan Lampung dalam bidang Militer dan Politik dari Agresi Militer Belanda II tahun 1949”

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut : “Bagaimanakah Upaya penyelamatan Karesidenan Lampung dalam bidang Militer dan Politik dari Agresi Militer Belanda II tahun 1949?”.

C. Tujuan, Kegunaan, dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Upaya penyelamatan Karesidenan Lampung dari Agresi Militer Belanda II tahun 1949.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu

1. Dapat memberikan pengetahuan serta wawasan khususnya dalam bidang kesejarahan yakni mengenai pemerintahan di Karesidenan Lampung Tahun 1949.
2. Sebagai bahan tambahan substansi materi tentang Sejarah Lokal.
3. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan Ilmu Sosial pada umumnya dan Ilmu Sejarah pada khususnya tentang upaya penyelamatan Karesidenan Lampung mempertahankan wilayah Lampung dari serangan Belanda dari Agresi Militer Belanda II tahun 1949.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat masalah di atas cukup umum dalam penelitian untuk menghindari kesalah pahaman, maka dalam hal ini peneliti memberikan kejelasan tentang sasaran dan tujuan penelitian mencakup:

Objek Penelitian : Karesidenan Lampung

- Subjek Penelitian : Upaya Karesidenan Lampung mempertahankan wilayah Lampung dari serangan Belanda
- Tempat Penelitian : Perpustakaan Unila dan Perpustakaan Daerah Lampung
- Waktu Penelitian : Tahun 1949
- Bidang Ilmu : Sejarah Lokal.

REFERENSI

Wikipedia Indonesia

Dewan Harian Daerah Angkatan 45. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Lampung buku III*. CV. Mataram. Bandar Lampung
498 halaman

The Liang Gie. 1993. *Pertumbuhan Pemerintah daerah di Negara Republik Indonesia Jilid I*. Liberty: Yogyakarta.

Wikipedia Indonesia

<http://basajarah.wordpress.com/2012/10/17/agresi-militer-belanda-ke-koto-tinggi/>